I

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA	O SUARA KARYA
● INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS	O SUARA PEMBARUAN
O KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☒ LISTRIK ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI
☐ MIGAS ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 22 TAHUN 2008

PLN Sokong Program Desa Energi Mandiri

SUMEDANG - PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) mencanangkan program Caang Desa Mandiri Energi melalui pemanfaatan potensi energi alternatif yang berasal dari kotoran sapi (biogas) untuk penerangan rumah dan masak di Haurngombong, Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat.

Lewat program bina lingkungan, PLN DJBB membantu warga Desa Haurngombong dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan energi alternatif berbentuk lima intalasi peralatan reaktor biogas.

"Satu reaktor bisa dimanfaatkan oleh tiga rumah, dan 10 buah genset 500 Watt yang bisa dimanfaatkan untuk penerangan 50 lampu X lampu hemat energi 10 Watt di saat beban puncak," ujar GM PLN DJBB Budiman Bachrulhayat saat pencanangan program Caang Desa Mandiri Energi di Haurngombong, Sumedang, baru-baru ini.

Hadir dalam pencanangan tersebut, Wakil Bupati Sumedang Osin Herlianto, Dirut PLN Fahmi Mochtar, Komisaris Utama PLN Alhilal Hamdi, dan Rektor Universitas Padjadjaran Gandjar Kurnia.

Fahmi mengatakan, bahan bakar biogas memiliki potensi sebagai bahan bakar alternatif untuk menghemat penggunaan BBM dan listrik secara signifikan. "Energi listrik dari biogas cocok diterapkan di desa-desa karena penggunaan listrik di desa relatif tidak besar," ujarnya.

Budiman mengatakan, satu kepala keluarga (KK) yang telah menggunakan listrik biogas, satu pelanggan bisa menghemat sebesar 1,75 kilowatthour (KW) pada masa beban puncak atau setara dengan Rp 26.000 per bulan. PLN, lanjut dia, bisa menghemat Rp 118.000 per bulan, sehingga total penghematan mencapai Rp 144.000 per bulan.

Dia menegaskan, program Caang Desa Energi Mandiri ini akan diadakan di seluruh wilayah kerja PLN DJBB sesuai dengan potensi energi masing-masing daerah. **(dr/ant)**

1

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

○ BISNIS INDONESIA	○ SUARA KARYA
○ INVESTOR DAILY	○ SEPUTAR INDONESIA
○ KOMPAS	○ SUARA PEMBARUAN
● KORAN TEMPO	○ SINAR HARAPAN
○ KORAN KONTAN	○ TABLOID KONTAN
○ MEDIA INDONESIA	○ THE JAKARTA POST
○ NERACA	○ MAJALAH GATRA
○ PIKIRAN RAKYAT	○ MAJALAH TEMPO
○ RAKYAT MERDEKA	○ MAJALAH TRUST
○ REPUBLIKA	○

KODE : ☒ LISTRIK ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI
☐ MIGAS ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A6 TAHUN 2008

Pemadaman Listrik Bikin Resah Pengusaha

Citra Batam sebagai tujuan investasi menjadi buruk.

BATAM — Selama sepekan terakhir, pihak Otorita Batam, pengusaha, dan warga Kota Batam, Kepulauan Riau, resah akibat pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. "Pengusaha sangat dirugikan," kata Ketua Otorita Batam Mustofa Wijaya kepada *Tempo* kemarin.

Akibat pemadaman bergilir, Otorita Batam menerima banyak telepon dari investor dan masyarakat. "Mengeluhkan belum secara tertulis, tapi banyak melalui telepon," ujar Mustofa.

Pernyataan senada diutarakan Wakil Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau Alfan Suhairi. "Kadin diminta bersuara oleh para pengusaha," kata Alfan, yang juga Presiden Direktur PT Bardipa Mutiara Indragiri. "Biasanya menerima order 12 juta sehari, kini hanya Rp 4 juta."

Pemadaman listrik membuat berang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Kemarin wakil rakyat Batam mengundang pihak manajemen PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. Menurut Direktur PT PLN Zainuddin, pemadaman bergilir dilakukan karena pasokan gas dikurangi tiba-tiba oleh PT Perusahaan Gas Negara.

Atas dasar itu, pihaknya beralih dari bahan bakar minyak ke gas untuk mengaktifkan mesin pembangkit. Alasannya, harga gas lebih murah dan ini bisa menjamin kelangsungan berusaha para pebisnis di Batam.

Sebelum beralih ke gas, pihaknya sempat menggunakan bahan bakar minyak jenis *marine fuel oil*. "Namun, mengakibatkan kerugian Rp 940 juta setiap hari," katanya.

Direktur Perusahaan Gas Negara Bambang mengatakan pemadaman bergilir terjadi karena pihaknya kekurangan pasokan gas. Mestinya pasokan gas 40 *million British thermal units* (mmBtu) setiap hari, tapi kini hanya 13,7 mmBtu.

Dia belum bersedia menjelaskan pengurangan itu. "Soal itu tanya kepada orang ConocoPhillips," kata Bambang kepada *Tempo* seusai acara dengar pendapat dengan DPRD. Di hadapan anggota Dewan, Bambang berjanji hanya bisa menambah 5 mmBtu lagi, tapi penambahan itu tak membuat pemadaman listrik bergilir di Batam dihentikan.

Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah berjanji akan membawa masalah ini kepada Presiden. Sebab, dengan seringnya pemadaman lampu, citra Batam sebagai tujuan investasi menjadi buruk. ● RUMBADI DALLE

2

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA	O SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS	O SUARA PEMBARUAN
● KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☒ LISTRIK ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI
☐ MIGAS ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9	10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29 30 31							

HALAMAN : 46 TAHUN 2008

PLTU Segera Dibangun di Padang

PADANG — Pembangkit listrik tenaga uap senilai Rp 2,3 triliun segera dibangun di Desa Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. "Proyek yang dimulai tahun ini direncanakan selesai pada 2010," ujar Fahmi Mochtar, Direktur Utama PT PLN (Persero).

Penandatanganan kontrak kerja sama PLTU dilakukan PT PLN dengan China National Technical Import & Export Corporation, konsorsium asal Cina yang bekerja sama dengan PT Rekayasa Industri di Padang. Hadir dalam acara itu Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi.

Menurut Fahmi, PLTU Teluk Sirih merupakan bagian dari proyek listrik 10 ribu megawatt secara nasional. "Listrik 2 x 100 megawatt akan dapat menambah cadangan energi listrik interkoneksi di Sumatera," katanya. ● FEBRIANTI

3

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA	O SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS	O SUARA PEMBARUAN
● KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☐ LISTRIK ☒ MIGAS ☐ ENERGI ALTERNATIF ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI ☐ UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A2 TAHUN 2008

EDITORIAL

Antisipasi Penimbunan Bahan Bakar

Aksi memborong dan menimbun bahan bakar minyak yang akhir-akhir ini mulai terjadi harus segera diatasi. Untuk mengatasi penimbunan, langkah pengawasan oleh polisi saja tidak cukup. Pihak Pertamina pun harus bertindak keras. Langkah keras bukan hanya dengan mengawasi pompa bensin dan konsumen yang membeli bahan bakar dalam jumlah tidak wajar. Lebih dari itu, Pertamina harus ketat mengawasi, adakah orang-orang di jalur distribusi yang di bawah kontrol Pertamina ikut terlibat. Bagaimanapun, aksi penimbunan dalam jumlah besar akan sulit dilakukan bila pihak Pertamina tidak memberi peluang.

Aksi penimbunan sebetulnya sudah bisa diperkirakan sejak awal. Begitu pemerintah menyatakan harga bahan bakar akan naik, pengguna bahan bakar segera ambil ancang-ancang. Lamanya waktu antara pengumuman kenaikan harga dan eksekusi harga baru—sekitar tiga minggu—sudah pasti menjadi peluang emas bagi penimbun. Dan para penimbun ini tak harus pedagang yang mencoba mencari untung besar secara tidak wajar. Mereka bisa juga konsumen biasa. Pemilik mobil, misalnya, bisa saja, yang sebelumnya membeli bahan bakar secukupnya, kini selalu mencoba memenuhkan tangki bahan bakar mobilnya.

Penimbun kecil-kecilan seperti itu, pada dasarnya, masih bisa ditoleransi. Berapalah bahan bakar yang bisa mereka kumpulkan dalam tangki mobil atau sepeda motornya. Justru para "penimbun sejati", yaitu mereka yang memborong bahan bakar dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya setelah harga naik, yang harus menjadi target perhatian serius Pertamina dan polisi. Termasuk yang harus dicermati adalah modus menimbun dengan cara berkali-kali mengisi bahan bakar di pompa bensin setelah memindahkan isi tangki bensin yang penuh ke penampungan lain.

Langkah serius itu diperlukan karena aksi borong bahan bakar menunjukkan gejala meningkat. Hanung Budya, Deputi Direktur Niaga Pertamina, mencatat, telah terjadi lonjakan permintaan bahan bakar di seluruh Indonesia sejak ada kepastian bahwa harga bahan bakar akan naik. Lonjakan ini pula yang, seperti dikatakan Wisnuntoro, pejabat Hubungan Masyarakat Pertamina, membuat konsumsi bahan bakar, khususnya bensin dan solar, pada kuartal pertama 2008, melewati kuota normal.

Terlewatinya kuota normal memang masih dalam batas wajar. Pertamina memastikan persediaan bahan bakar masih cukup untuk melayani permintaan. Namun, cukupnya persediaan bukanlah jaminan bahwa tidak akan terjadi kelangkaan. Karena itu, selain harus memastikan bahwa tidak terjadi pembelian dalam jumlah tak wajar, Pertamina harus memastikan bahwa jaringan distribusi ke seluruh Indonesia tidak terganggu dalam saat-saat kritis seperti sekarang.

Sudah pasti Pertamina tak bisa bekerja sendiri dalam soal ini. Kerja sama dengan kepolisian, juga dengan Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas, yakni jaringan pengusaha minyak dan gas, harus diperkuat. Hanya dengan koordinasi yang ketat dan keberanian bertindak tegas, dampak buruk rencana kenaikan harga bahan bakar itu bisa diminimalkan. ●

4

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

● BISNIS INDONESIA	O SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS	O SUARA PEMBARUAN
O KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☑ LISTRIK ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI
☐ MIGAS ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3 TAHUN 2008

Pasokan listrik terbatas, pertumbuhan sektor manufaktur tertekan

Oleh Chamdan Purwoko
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Keterbatasan pasokan listrik belakangan ini akan menekan laju pertumbuhan sektor manufaktur nasional.

Karena itu, pemerintah perlu menyusun skema aturan yang jelas untuk mendorong pengembangan pembangkit swasta.

Dengan mendorong swasta membangun pembangkit listrik—khususnya pembangkit non-BBM—kebijakan tersebut akan dapat memangkas anggaran subsidi, terlebih di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus level US$122 per barel.

Luhut Binsar Pandjaitan, mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan jika pemerintah tidak mampu menyediakan pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan, industri manufaktur akan sulit melakukan ekspansi produksi dan mengembangkan bisnis. "Kalau listrik sering padam seperti sekarang, bagaimana mungkin industri bisa tumbuh," ujarnya, di kediamannya di Kawasan Mega Kuningan, baru-baru ini.

Luhut Binsar Pandjaitan

Dia mencontohkan industri di Medan Sumatra Utara saat ini mengalami kesulitan pasokan listrik. Di wilayah ini listrik sering padam dalam waktu 2 jam hingga 4 jam yang secara langsung akan memangkas produktivitas.

Menurut dia, penambahan produksi listrik melalui program 10.000 MW dinilai lambat karena terhambat proses birokrasi dalam pelaksanaan tendernya.

"Akan lebih cepat jika pemerintah mendorong peran swasta untuk membangun pembangkit baru," ujarnya.

Problem utama di sektor kelistrikan di Indonesia, ujarnya, ada dua yakni dari sisi pasokan dan ketergantungan pembangkit terhadap BBM yang masih sangat tinggi.

Dari sisi pasokan listrik, permasalahan yang dihadapi a.l. rendahnya pertumbuhan penyediaan tenaga listrik yang 6%-9% per tahun, sehingga sangat kurang untuk dapat memenuhi permintaan listrik nasional. Data pada 2007, dari 69.215 desa di Indonesia, baru 79% yang teraliri oleh listrik PLN (Persero).

Perjelas aturan

Untuk mendorong pembangunan pembangkit swasta, pemerintah perlu membuat aturan yang jelas dan menárik. Salah satunya, katanya, pemerintah harus membenahi sistem kontrak jual beli listrik (*power purchasing agreement*/-PPA) antara PT PLN dan pengembang pembangkit listrik swasta (*independent power producer*/IPP).

"Misalnya, pemerintah menerapkan ketentuan adanya dana jaminan dan denda bagi pemegang PPA yang tidak menjalankan kontraknya. Dana jaminan akan hangus jika dalam waktu yang ditentukan belum juga membangun pembangkit listrik," ujar Luhut yang kini menjabat presiden komisaris sebuah perusahaan yang bergerak di sektor energi.

Selain itu, pemerintah perlu memberi insentif dengan mendorong PT PLN menaikkan harga pembelian listrik dari IPP yang saat ini Rp 492 per kWh menjadi Rp 600 per kWh. "Kalau harganya menarik, pasti banyak investor berminat."

6

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

● BISNIS INDONESIA
○ INVESTOR DAILY
○ KOMPAS
○ KORAN TEMPO
○ KORAN KONTAN
○ MEDIA INDONESIA
○ NERACA
○ PIKIRAN RAKYAT
○ RAKYAT MERDEKA
○ REPUBLIKA

○ SUARA KARYA
○ SEPUTAR INDONESIA
○ SUARA PEMBARUAN
○ SINAR HARAPAN
○ TABLOID KONTAN
○ THE JAKARTA POST
○ MAJALAH GATRA
○ MAJALAH TEMPO
○ MAJALAH TRUST
○

KODE : ☑ LISTRIK ☐ MIGAS ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2008

Industri lokal sanggup pasok 51 juta lampu HE

Bisnis Indonesia

JAKARTA: Industri lampu di dalam negeri kembali menegaskan mampu memenuhi pengadaan 51 juta unit lampu hemat energi (LHE) dalam program penghematan listrik yang dicanangkan PT PLN (Persero).

Menurut John Manoppo, Ketua Umum Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo), bagi industri lokal program pengadaan LHE sebanyak 51 juta unit merupakan *captive market* untuk memacu kinerja industri.

"Kami harap mereka [PLN] konsisten dengan klasifikasi yang sudah pernah disampaikan. Misalnya, sesuai dengan SNI, umur lampu minimal 5.000 jam, menggunakan komponen dalam negeri. Intinya pengadaan ini harus menggunakan produk dalam negeri," katanya kepada *Bisnis*, kemarin.

Sebelumnya, proses tender pengadaan LHE sempat dibekukan sementara oleh manajemen PLN, menyusul pergantian direksi di tubuh BUMN sektor kelistrikan tersebut.

Lewat program tersebut, PLN akan membagikan LHE secara gratis dengan tujuan menghemat konsumsi listrik di sektor rumah tangga.

Kini, untuk tahap awal yang mulai 30 April lalu, PLN Distribusi Bali telah membuka prakualifikasi tender pengadaan sebanyak 941.964 unit LHE dengan pagu anggaran Rp15 miliar.

John mengatakan kapasitas produksi LHE nasional mencapai 150 juta per tahun yang merupakan akumulasi dari 14 produsen di dalam negeri. "Karena itu pengadaan 51 juta unit tersebut pasti dapat kami dipenuhi."

Produk dalam negeri, katanya, saat ini telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional sebagaimana yang disyaratkan PLN, dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan impor.

Dalam tender ulang LHE PLN tersebut, tambahnya, harga per unit lampu turun dari Rp18.000 per unit pada tender sebelumnya menjadi Rp15.000. Terkait dengan penurunan harga itu, Aperlindo menilai harga lampu Rp15.000 itu cukup wajar sebab pengusaha sudah memperoleh margin.

Tumbuh 20%

John menambahkan pertumbuhan industri perlampuan tahun ini diproyeksikan mencapai 20% dengan volume produksi 120 juta unit, termasuk di dalamnya 51 juta unit LHE pesanan PLN.

Pada tahun lalu, industri ini tumbuh juga sekitar 20% atau dengan kenaikan volume produksi menjadi 100 juta unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 80 juta unit.

"Industri lampu hemat energi saat ini tumpuan harapan dalam program penghematan energi, seiring dengan lonjakan harga minyak dunia yang membuat tarif dasar listrik bakal naik," katanya. (09)

5

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA	O SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
● KOMPAS	O SUARA PEMBARUAN
O KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☒ LISTRIK ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI
☐ MIGAS ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13 TAHUN 2008

Listrik Mikrohidro Murah

Biaya Pokok Produksi Tidak Pernah Transparan

JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan energi alternatif mikrohidro sampai sekarang tidak optimal. Hal ini karena penjualan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ramah lingkungan ini ke PLN masih dihargai relatif murah sehingga tidak pernah menguntungkan bagi setiap pengelolanya.

Kondisi ini berlawanan dengan subsidi yang diberikan pemerintah pada bahan bakar minyak fosil untuk memproduksi listrik PLN. Subsidi ini dipandang sudah tidak signifikan lagi. Sudah saatnya subsidi itu diberikan untuk pengembangan listrik dari energi alternatif yang sumbernya berlimpah di Indonesia.

Demikian dikemukakan Koordinator Tim Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) Protokol Kyoto pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Irhan Febijanto kepada *Kompas*, Jumat (9/5), di Jakarta.

"Pengelola pembangkit listrik dari energi alternatif oleh swasta ataupun masyarakat sama sekali tidak pernah mendapat subsidi," kata Irhan.

Dicontohkan, produk listrik dari pembangkit listrik mikrohidro yang dikelola masyarakat di Jawa Barat dijual ke PLN dengan harga Rp 432 per kilowatt (kW).

Harga itu amat murah jika dibandingkan dengan penjualan listrik tersebut oleh PLN kepada konsumen di tingkat rumah tangga, yaitu Rp 650 per kilowatt. "Listrik untuk konsumen dari PLN itu pun masih disubsidi pemerintah," kata Irhan.

Soal transparansi

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Emy Perdanahari mengatakan, ada persoalan mengenai transparansi biaya pokok produksi (BPP) listrik regional sehingga penjualan listrik dari energi alternatif kepada PLN jadi murah.

"Harga listrik swasta dan masyarakat hasil energi alternatif kalau dijual ke PLN ditetapkan harganya 80 persen BPP regional jika masuk jaringan tegangan tinggi (di atas 20 kilovolt), dan 60 persen BPP jika masuk jaringan tegangan menengah (di bawah 20 kilovolt)," ujar Emy.

Menurut Emy, nilai BPP regional di Jawa sekarang seharusnya mencapai kisaran harga Rp 900 per kW.

Dengan harga listrik mikrohidro di Jawa Rp 432 per kW asumsinya BPP regional adalah Rp 540 per kW untuk masuk jaringan tegangan tinggi. Untuk tegangan menengah, BPP terhitung Rp 720 per kW.

Irhan mengatakan, langkah lain untuk mengoptimalkan listrik dari mikrohidro saat ini dengan memasukkan ke program CDM Protokol Kyoto. BPPT sekarang membantu lima proyek mikrohidro agar masuk CDM, berlokasi di Cileunca, Jawa Barat (1 megawatt/MW); Siteki dan Blumbungan di Banjarnegara, Jawa Tengah, masing-masing 1,2 MW dan 1,6 MW, serta Ketenger di Purwokerto, Jawa Tengah (0,5 MW); dan 2,4 MW di Rante Balla Sulawesi Selatan. (NAW)

7

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA	O SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS	✓ SUARA PEMBARUAN
O KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☑ LISTRIK ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI
☐ MIGAS ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11 TAHUN 2008

Curi Listrik, Puluhan Rumah di Cileungsi Dirazia

[BOGOR] Puluhan rumah kontrakan di Desa Dayeuh RT 04/05 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (9/5) siang, terjaring Operasi Pencurian Aliran Listrik (OPAL) yang dilancarkan PT PLN Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Cileungsi.

Menurut Syaiful Hikmat, Manager PT PLN UPJ Cileungsi, pihaknya akan melaporkan kasus pencurian listrik terhadap 20 unit rumah kontrakan di Desa Dayeuh itu ke kepolisian. Modus mencuri di puluhan rumah kontrakan itu menggunakan alat pengerem catut daya di dalam meteran instalasi listrik milik PLN, sehingga aliran listrik yang dipakai tinggi, namun yang tercatat di meteran rendah. Akibat tindakan itu kerugian PLN diperkirakan mencapai Rp 40 juta.

"OPAL yang kami lakukan sudah lima kali dan sudah lima kali itulah puluhan rumah masih menggunakan alat mengerem catut daya untuk mencuri listrik sehingga membayar bulanannya rendah ke PLN. Untuk itu kami akan menuntut dari isi perdata selain pidananya," ujar Syaiful.

Syaiful mengaku bahwa pada hari itu pihaknya datang ke daerah tersebut selain melakukan OPAL juga untuk menyosialisasi penghematan arus listrik kepada warga setempat. "Selama melakukan razia di daerah ini kami menemukan sebanyak 50 kasus, mulai dari penyadapan aliran listrik hingga mengerem catut daya dengan memasang benda lain di dalam instalasi. Di daerah ini setiap bulannya kami dirugikan sekitar Rp 40 juta. Kami tidak bisa berdiam diri, warga harus diajukan ke proses hukum," ujarnya.

Razia OPAL yang dilakukan PT PLN UPJ Cileungsi terhadap 20 rumah kontrakan membuat penghuni kaget. Mereka mengaku tidak pernah tahu kalau instalasi yang dipasang dan aliran listrik yang digunakannya adalah hasil pencurian. "Saya hanya mengontrak di rumah ini. Saya tidak pernah tahu kalau instalasi dipasang alat pengerem catut daya listrik. Dan saya juga tidak pernah tahu siapa yang melakukan itu. Saya hanya membayar uang kontrakan termasuk iuran listrik kepada pemiliknya," kata Ipah (30), pengontrak rumah yang ketahuan listriknya bermasalah.

Sementara itu, Rofiah, pemilik rumah kontrakan yang bersebelahan, mengaku dirinya juga tidak pernah tahu kalau instalasi listrik yang dipasang di rumah kontrakan tersebut ternyata harus bermasalah dengan PT PLN. [126]

8

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA	O SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS	O SUARA PEMBARUAN
O KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
● KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☒ LISTRIK ☐ MIGAS ☐ ENERGI ALTERNATIF ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI ☐ UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2008

PLN Distribusi Bali akan Memulai Tender LHE

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali menggelar tender pengadaan lampu hemat energi (LHE), setelah mereka menganulir pemenang sebelumnya. Namun, proses tender kali ini tidak melibatkan PLN Pusat, tapi dilaksanakan oleh setiap unit distribusi PLN. Nah, dalam waktu dekat ini yang akan menggelar tender adalah PLN Distribusi Bali.

Ketua Umum Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo) John Manoppo mengungkapkan, tender LHE di PLN Bali pekan ini sudah memasuki batas akhir pengambilan dokumen prakualifikasi. Adapun batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi adalah 15 Mei nanti. "Pengumuman hasil prakualifikasi tender akan dilakukan pada 19 Mei," jelasnya.

Namun Manoppo melihat pagu anggaran LHE pada tender kali ini menyusut dibandingkan dengan tender LHE sebelumnya. Saat ini, pagu anggaran hanya sebesar Rp 15 triliun untuk pengadaan sebanyak 941,964 unit. Artinya, setiap lampu hanya dihargai antara Rp 15.000 sampai Rp 16.000. Padahal, sebelumnya, harga setiap lampu sekitar Rp 18.000 per unit.

Sekadar pengetahuan, akhir Maret lalu, PLN Pusat sudah menetapkan tiga pemenang tender LHE untuk paket satu sampai tiga. PT Gunawan Elektrindo, produsen LHE merek Visicom terpilih sebagai pemenang paket satu. PT Ningbo Indonesia, produsen merek Shinyoku, sebagai pemenang paket dua. Dan PT Wijaya Karya, importir LHE yang berhasil memenangkan paket tiga.

Namun hasil tender itu batal, sebab menurut PLN Pusat, yang lebih berwenang melakukan tender LHE adalah PLN Distribusi Daerah. Karena anggaran LHE itu memang untuk daerah.

Abdul Wahid Fauzie

9

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA	● SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY	O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS	O SUARA PEMBARUAN
O KORAN TEMPO	O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN	O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA	O THE JAKARTA POST
O NERACA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O

KODE : ☒ LISTRIK ☐ MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI ☐ GEOLOGI
☐ MIGAS ☐ UMUM
☐ ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

PROYEK APBN

PLN Tender Ulang Pengadaan LHE, Industri Dalam Negeri Siap Pasok

JAKARTA (Suara Karya): PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengadakan tender ulang pengadaan lampu hemat energi (LHE). Tender untuk pengadaan total 51 juta unit LHE secara nasional itu dimulai di PLN Distribusi Bali yang membutuhkan sekitar 941.964 unit.

Sebelumnya PLN sudah membatalkan tender pengadaan LHE meski sudah ditunjuk pemenangnya pada April 2008 lalu dengan alasan pergantian direksi dan otonomisasi pengadaan ke PLN di daerah.

Berdasarkan dokumen yang diterima wartawan, pengadaan LHE untuk PLN Distribusi Bali ini merupakan proyek perdana dari total pengadaan LHE secara nasional. Proses tender sudah dimulai sejak akhir April 2008 lalu, di mana batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi pada 15 Mei 2008.

Terkait hal ini, Ketua Umum Asosiasi Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo) John Manoppo mengatakan, kalangan produsen berharap proses tender pengadaan LHE tidak lagi berubah-ubah hingga dibatalkan seperti yang lalu. Kalangan industri nasional membutuhkan kepastian agar bisa mempersiapkan produksi dan stok LHE.

"Rencana pengadaan LHE sebanyak 50 juta unit itu sangat besar dan butuh persiapan karena terkaitb skala produksi. Oleh karena itu jangan ada pembatalan atau penundaan lagi. Selama ini kami sudah menyiapkan stok hingga 750.000 unit LHE per hari," kata John di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kalangan industri yang memproduksi LHE siap memenuhi kebutuhan 51 juta unit LHE. Apalagi di antara industri dalam negeri yang menjadi anggota Aperlindo siap saling membantu dan mendukung.

"Kita berharap PLN memprioritaskan tender pengadaan LHE untuk industri dalam negeri yang melakukan kegiatan produksi LHE. Bukan hanya sekadar distributor LHE impor atau agennya," kata John. **(Andrian)**

10